BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Subyek : Kerusakan Lingkungan
Edisi : 26 Juni 2008
Halaman : 14

# Pembangunan Trans Papua

## Kelestarian Alam Terancam

Rumah penduduk (Honai) berada di lereng gunung serta lembah di Kabupaten Yahukimo, wilayah Pegunungan Tengah, Papua. Faktor cuaca yang setiap saat berubah serta kondisi topografi wilayah yang bergunung dan lembah merupakan salah satu penghambat komunikasi dengan pesawat terbang ke daerah tersebut. Foto diambil baru-baru ini

[JAYAPURA] Greenpeace dan Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua meminta pemerintah tak menutupi ancaman dan risiko kepunahan yang harus dihadapi masyarakat dengan alam akibat rencana pembangunan Trans Papua.

Membuka akses jalan ke dalam hutan Papua demi pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar sepanjang 4.500 kilometer (km) tidak hanya akan mengakibatkan penyusutan keanekaragaman hayati yang tak terpulihkan, tetapi juga akan berdampak terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat asli.

Juru Kampanye Hutan Greenpace Asia Tenggara Bustar Maitar mengemukakan hal itu kepada *SP* di Jayapura, Papua, Rabu (25/6) malam.

Trans Papua yang menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat akan melintasi kawasan konservasi yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Keragaman hayati tersebut akan punah. "Kami meminta masyarakat asli Papua untuk mewaspadai kebijakan percepatan pembangunan, khususnya rencana pembangunan infrastruktur yang didorong oleh rencana eksploitasi sumber daya alam atas nama kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Jika masyarakat asli Papua tak bersikap tegas, pasti akan kehilangan keindahan alam sekaligus bisa saja penduduknya menjadi punah," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Foker LSM Papua, Septer Manufandu mengatakan, dengan dukungan Greenpeace Asia Tenggara, pihaknya berencana menyelenggarakan serangkaian konsultasi publik antara Juli dan Desember 2008 guna mengkaji risiko tak terhindarkan yang akan dihadapi kehidupan sosial dan lingkungan akibat pembangunan Trans Papua ini.

**Kajian**

Diungkapkan, hasil konsultasi publik ini akan menjadi rujukan utama bagi Foker LSM Papua melaksanakan kajian lingkungan strategis terhadap kebijakan percepatan pembangunan Papua. Hasil kajian tersebut merupakan landasan bagi Foker LSM Papua menuntut pemerintah memastikan bahwa kebijakan tersebut akan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Papua

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Pembangunan Trans Papua merupakan prioritas dari Inpres Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Pembangunan infrastruktur secara umum diakui sebagai cara untuk membuka akses terhadap wilayah-wilayah terpencil.

Namun, jika tidak berhati-hati disertai kajian yang matang, keanekaragaman hayati dan manusia asli Papua akan punah akibat kehilangan ekosistemnya. Alam bagi manusia Papua adalah ibu kandung yang harus dijaga karena memberikan kehidupan kepada anak-anaknya, yakni 250 suku asli di Tanah Papua yang dijuluki Firdaus Terakhir.

Belajar dari wilayah Indonesia lain, pembangunan infrastruktur justru mengancam tanah adat. Pada saat yang sama merusak kesatuan ekosistem hutan hujan tropis yang tersisa di Tanah Papua, kecuali jika seluruh pihak bersungguh-sungguh memperbaiki tata kelola pengurusan tata ruang wilayah.

"Bagaimanapun, ternyata Inpres tersebut menempatkan masyarakat Papua sebagai objek pembangunan. Percepatan pembangunan belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat Papua. Kami khawatir, kebijakan tersebut justru akan mempercepat proses penghancuran Tanah Papua dan punahnya masyarakat Papua. Kami percaya ada banyak peluang bagi Tanah Papua untuk mengembangkan ekonomi serta memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat tanpa mengancam keberadaan tanah adat dan hutan yang tersisa," tandasnya. [154]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup